

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA BUDAYA STRATEGIS TIONGKOK

Dalam bukunya *Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics*, Yuan Kang Wang⁴⁴ menjelaskan bahwa terdapat tiga budaya strategis (*strategic culture*) Tiongkok yang memengaruhi preferensi perilaku strategisnya (*strategic behaviors*), dalam kaitannya dengan kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negerinya, guna mencapai kepentingan-kepentingan keamanannya di kawasan seperti *Confucian Pacifism*, *Cultural Realism* dan *Structural Realism*.

Ketiga budaya strategis ini merupakan refleksi dari budaya keamanan (*security culture*) yang diyakini, diadopsi dan diterapkan oleh Tiongkok. Memuat serangkaian prinsip-prinsip dan norma-norma keamanan yang silih berganti memengaruhi preferensi strategi keamanan Tiongkok. Pada era Perang Dingin, budaya keamanan *Cultural Realism* dan *Structural Realism* menjadi tradisi berfikir *mainstream* di kalangan para elit-elit politik pengambil kebijakan keamanan nasional dan luar negeri Tiongkok. Namun justru pasca Perang Dingin, *Confucian*

⁴⁴ Yuan Kang Wang adalah *Associate Professor* di *Department of Sociology Western Michigan University (WMU) Kalamazoo Amerika Serikat*. Wang memperoleh gelar Ph.D dalam bidang ilmu politik dari *University of Chicago*. Selain itu, pernah juga menjadi *International Security Fellow* di *Harvard University's Belfer Center for Science and International Affairs* dan menjadi *Visiting Fellow* di *Brookings Institution's Center for Northeast Asian Policy Studies*. Selain sebagai

Pacifism kembali sebagai tradisi berfikir *mainstream* para *policy-makers* Tiongkok dalam merespon pelbagai macam persoalan-persoalan keamanannya di kawasan.

Lebih lanjut, Wang menjelaskan bahwa budaya keamanan Tiongkok yang *an sich* adalah *Confucian Pacifism* itu sendiri. Mengingat ajaran-ajaran *Confucian Culture* itu sendiri sudah sejak lama menjadi panduan dan pedoman hidup bagi masyarakat Tiongkok, dan bahkan menjadi ideologi negara (*state's ideology*) di era Tiongkok tradisional (*Chinese ancient*). Meskipun demikian, ketiga budaya strategis tersebut, masing-masing memuat serangkaian norma-norma dan prinsip-prinsip (*tenets*) keamanan yang sekiranya menjadi *role-model* bagi upaya pemecahan masalah (*problem solving*) dalam merespon pelbagai tantangan-tantangan dan sejumlah persoalan-persoalan keamanan di kawasan.

A. *Confucian Pacifism*⁴⁵

Confucian Pacifism sebagai budaya strategis Tiongkok, merupakan *School of Thought* yang akar konseptual pemikirannya bersumber dari *Confucian Culture* warisan sejarah (*Chinese ancient's historical legacy*) pemikiran kebijaksanaan konvensional (*conventional wisdom*) para filsuf Tiongkok yang notabene begitu dominan berpengaruh, dan dijadikan sebagai *tenets* dalam menentukan preferensi perilaku strategis. Beberapa filsuf terkemuka era Imperial Tiongkok (*Chinese ancient*) yang memengaruhi dan membentuk budaya keamanan *Confucian Pacifism*

tersebut antara lain yaitu: *Confucius*, Laozi (*Daoist*), Mozi (*Mohist*) dan Sunzi (*Sun Tzu*).

Pemikiran konseptual ke-empat filsuf Tiongkok tersebut menjadi *cornerstone*, yang memengaruhi bagaimana pembentukan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan *Confucian Pacifism*. Secara simultan, mereka mengajarkan bahwa, penggunaan strategi *hard power* atau *militarism* dalam mewujudkan kepentingan dan tujuan keamanan, tidak dapat dibenarkan dan tercapai, melainkan dengan mengutamakan strategi *non-militarism* atau *soft power*. *Confucius* misalnya, memandang penting bahwa kunci bagi terwujudnya keamanan adalah kultivasi kebaikan dan kepedulian antar sesama manusia, dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer. Sejalan dengan *Confucius*, Laozi menolak *tenets* bahwa penggunaan kekuatan sebagai strategi efektif bagi para negarawan untuk mewujudkan kepentingan keamanannya, namun justru sebaliknya, menekankan pada prinsip *using softness to overcome hardness* (*yi rou ke gang*), menggunakan strategi kekuatan lunak untuk mengatasi kekerasan itu sendiri.

Mozi bahkan mengutuk keras peperangan ofensif (*offensive warfare*) sebagaimana tercermin dalam konsepsinya tentang *against attacking* (*fei gong*, menentang penyerangan), dan mengajarkan *universal love* (*jian ai*, universalime cinta-kasih), sebagai solusi konflik. Bahkan Sunzi dalam karya militernya *The Art of War*, mengajarkan bahwa

menekankan pula pentingnya kekuatan militer. Baginya peperangan merupakan *necessary evil* yang harus dihindari kapanpun dimungkinkan.

Confucian Pacifism bukan hanya sekedar *School of Thought* yang mengajarkan penggunaan instrumentasi *non-violent means* atau *peaceful settlement of dispute (culture of anti-militarist)* dalam merespon persoalan keamanan. Namun lebih daripada itu, *Confucian Pacifism*, merupakan *School of Thought* yang dominan berpengaruh (*mainstream*) sepanjang era Imperial Tiongkok. Bahkan begitu dominannya, *Confucian Pacifism* menjadi ideologi negara di era Dinasti Han, Dinasti Song dan Dinasti Ming.

Confucian Pacifism sebagai budaya strategis Tiongkok mengajarkan bahwa, penggunaan kekerasan (*doctrine of use of force*) sebagai suatu hal yang bersifat *reluctant*, reaktif dan defensif (*defensive grand strategy*). Gagasan *anti-militarist* yang diajarkan oleh budaya *Confucian Pacifism*, melarang penggunaan instrumen-instrumen kekerasan (*hard power*), dan lebih mengutamakan model pendekatan *peaceful means, non-coercive means* dalam penyelesaian konflik atau sengketa (*non-coercive identity*). Akibatnya, Tiongkok *reluctant* mengambil inisiatif untuk menggunakan instrumentasi kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan keamanannya, jikalau Tiongkok menggunakan instrumentasi kekerasan, hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan diri (*self-defense*), sebagai bentuk respon atas tindakan agresif dari kekuatan eksternal (*aggression of others*)⁴⁶.

Oleh karenanya, *Confucian Pacifism* menganjurkan Tiongkok untuk menerapkan *defensive* atau *accommodationist grand strategy*, tanpa harus mempertimbangkan seberapa besar potensi kekuatan yang dimilikinya, dibandingkan dengan yang lainnya. Meskipun ketika Tiongkok relatif *powerful* dibandingkan dengan yang lainnya, Tiongkok tidak akan mengadopsi *offensive grand strategy*. Tiongkok sendiri tidak bertujuan untuk memperlemah musuh-musuhnya, bahkan ketika Tiongkok sekalipun memiliki kapabilitas yang memungkinkannya untuk melakukan hal tersebut semakin meningkat. Justru Tiongkok dihadapkan pada pilihan *grand strategy* yang *pacifist* baik *accommodationist* maupun *defensive grand strategy*, atau mengejar kedua-duanya secara bersamaan.

Accommodationist grand strategy sendiri merupakan strategi kebijakan dan diplomasi keamanan yang berbasiskan pada kemurahan hati atau keluhuran budi (*magnanimity*), daya tarik atau keterkaguman (*awesomeness*), dan kebaikan suatu rezim, atau penggunaan insentif-insentif ekonomi, diplomasi, *bandwagoning*, dan instrumentasi-instrumentasi *non-coercive* lainnya. Sedangkan di satu sisi, *defensive grand strategy* merupakan strategi kebijakan dan diplomasi keamanan yang berbasiskan pada pembangunan pertahanan yang statis (*static defense*) di sepanjang tapal perbatasan, menggunakan perimbangan internal (*internal balancing*) untuk memobilisasi sumber daya yang ada, membangun aliansi penyeimbang (*balancing alliance*), atau terkait dengan segala bentuk kebijakan yang bersifat *low-coercive*.

Confucian Pacifism sendiri menganjurkan Tiongkok untuk memilih *non-violent means* seperti upaya-upaya diplomatik (*diplomacy*), pembangunan pertahanan statis, pemberian insentif-insentif ekonomi, dan bahkan daya tarik budaya (*cultural attractions*) guna menyelesaikan pelbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanannya. Tiongkok akan menggunakan instrumentasi kekuatan (*doctrine of use of force*) ketika diserang oleh kekuatan eksternal, dan *reluctant* untuk melakukan serangan pendahuluan (*pre-emptive strikes*) atau bahkan serangan pencegahan sekalipun (*preventive strikes*). Penggunaan instrumentasi kekuatan (*hard power*) adalah upaya terakhir (*last resort*) dalam mencapai tujuan keamanan Tiongkok. Sebelum menerapkan strategi *hard power*, sekiranya perlu untuk mengkonsiderasi secara mendalam (*seriously*) dan *non-trivial reluctance*. Secara fundamental, yang terpenting adalah bahwa, pilihan strategi *soft power* dengan mengedepankan *non-coercive means* telah mengakar di dalam kepercayaan budaya Tiongkok, bahwa penggunaan instrumentasi *hard power* semacam penggunaan kekuatan adalah perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip budaya *Confucian Pacifism*⁴⁷.

Confucian Pacifism sendiri menolak keras argumentasi mengenai efektivitas (*efficacy*) penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan keamanan, dan mengajarkan konsepsi perdamaian dan harmoni dalam konteks hubungan antar negara (*state to state relations*). Perang adalah

suatu keputusan yang menyimpang (*abnormal*), penggunaan kekuatan yang brutal akan menciptakan kekacauan. Penggunaan instrumen kekerasan merupakan hal yang tidak perlu dikedepankan, tidak memberikan manfaat, dan kontraproduktif. Kunci utama terciptanya keamanan nasional adalah membangun tata kelola pemerintahan domestik secara baik, berdasarkan pada pendidikan moral, maupun menjunjung tinggi kebajikan diantara para pemimpin negara.

Terkait dengan ajaran *Confucian Pacifism*, berdasarkan rekam jejak sejarah, Tiongkok yang makmur dan *powerful* merupakan *benign hegemon*, sebuah kekuatan hegemonik yang memberikan manfaat bagi sesamanya, bukan sebuah kekuatan hegemonik *an sich* yang berusaha untuk menjadi kekuatan ekspansionis untuk mendominasi kekuatan lainnya. Karena warisan budaya ini, di masa yang akan datang, Tiongkok yang kuat, tidak akan berperilaku agresif (*aggressor*) terhadap kekuatan lainnya, bahkan tidak juga menjadi kekuatan ekspansionis (*doctrine of non-expansionism*) meskipun kapasitas dan kekuatan nasionalnya semakin meningkat⁴⁸.

Confucian Pacifism sendiri menganjurkan bahwa tujuan peperangan Tiongkok tidak akan menyebabkan timbulnya eskalasi atau ketegangan di luar proteksi tapal batasnya. Tujuan kampanye dan peperangan militernya adalah untuk tujuan defensif, *me-restore status quo ante*, menangkalkan serangan musuh terhadap wilayah teritorialnya, atau untuk mempasifikasi musuh-musuhnya (*pacifist aims*). Perang yang bertujuan untuk pemusnahan

masal adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Tiongkok juga tidak akan menjadi sebuah kekuatan yang ekspansionis dengan melakukan penaklukan teritorial menggunakan instrumentasi-instrumentasi kekuatan (*hard power*), atau memperluas agenda dan tujuan peperangannya (*limited-aims*), sekalipun Tiongkok memiliki peluang untuk melakukan hal tersebut⁴⁹.

B. *Cultural Realism*⁵⁰

Cultural Realism sebagai budaya strategis Tiongkok merupakan *School of Thought* yang akar pemikiran konseptualnya bersumber dari norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan Tiongkok *Cultural Realist* yang *inherited* bukan *given*. Episentrum *inherited Cultural Realist* tersebut adalah *The Seven Military Classics*, sebuah *tenets* atau seperangkat perangai tentang budaya keamanan yang *militarism*, *offensive grand strategy*, *hegemonism*, *expansionism* dan *violent means*, pada abad ke-11, yang diyakini, diadopsi dan diterapkan oleh para *decisions-makers* Tiongkok.

Dalam bukunya *The Seven Military Classics of Ancient China*, Ralph D. Sawyer⁵¹ dan Mei Chun Sawyer menjelaskan bahwa, *The Seven Military Classics* tersebut terdiri atas tujuh teks militer penting yang

⁴⁹ *Ibid.*, p. 31-32.

⁵⁰ Budaya strategis *Cultural Realism* dalam berbagai literatur diistilahkan juga dengan *Parabellum Realist* dan *Hard Realpolitik*.

⁵¹ Ralph D. Sawyer adalah salah satu pakar studi dominan dalam bidang *Chinese Warfare* di Amerika Serikat. Sawyer telah "melanglang buana" menjalin kerjasama dengan sejumlah agensi *intelligence* dan agensi pertahanan. Sawyer menyelesaikan studinya di *Massachussetts Institute of Technology* (MIT) dan *Harvard University*, dan menghabiskan waktunya untuk mengajar selama 30

dicetuskan oleh *Ancient China*. Ketujuh teks tersebut antara lain yaitu: Enam Ajaran Rahasia Jiang Ziya (*Jiang Ziya's (Taigong) Six Secret Teachings*), Metode-metode Ssu-Ma atau Seni Perang Sima Rangju (*The Methods of The Ssu-Ma (Sima Rangju's Art of War)*), Seni Perang Sun Tzu (*Sun Tzu's The Art of War*), Wuzi Wu Qi (*Wu Qi's Wuzi*), *Wei Liaozi*, Tiga Strategi Huang Shigong (*Huang Shigong's Three Strategies*) dan *Questions and Replies between Tang Taizong and Li Weigong*.

Pertama, *Jiang Ziya's (Taigong) Six Secret Teachings*, memuat serangkaian ajaran-ajaran tentang strategi sipil dan militer dalam mencapai tujuan-tujuan perang, yang dicetuskan oleh Lu Shang atau lebih dikenal dengan Jiang Ziya, Jenderal berpengaruh semasa kekuasaan Raja Wen dari Dinasti Zhou. Secara substantif, *Six Secret Teachings* ini mengajarkan enam macam strategi berperang yaitu: strategi sipil, strategi militer, strategi naga, strategi macan, strategi *leopard* dan strategi anjing⁵².

Kedua, Metode-metode Ssu-Ma atau Seni Perang Sima Rangju (*The Methods of The Ssu-Ma (Sima Rangju's Art of War)*), memuat tentang hukum, regulasi-regulasi, kebijakan pemerintah, organisasi militer, administrasi militer, disiplin, nilai-nilai dasar, taktik dan strategi. Secara substantif, *The Methods of the Sima* mengajarkan tentang metode-metode organisasi, administrasi dan disiplin, yang diajarkan secara lebih mendalam dibandingkan dengan strategi atau taktik berperang di medan tempur. Oleh karenanya, *The Methods of the Sima* tidak secara dominan membahas

mengenai *battlefield command*, namun lebih menekankan pada bagaimana menginisiasi, mengorganisir dan mengatur *military campaigns*⁵³.

Ketiga, Seni Perang Sun Tzu (Sun Tzu's The Art of War), memuat tentang bagaimana strategi dalam menjalani peperangan yang terdiri atas tiga belas ajaran utama yaitu: penilaian secara mendalam dan perencanaan perang, membiayai peperangan, ilmu tentang serangan strategis, disposisi pasukan perang (tentara perang), ilmu tentang pasukan (*forces*), ilmu tentang kelemahan dan kekuatan musuh (lawan), strategi manuver militer, variasi dan adaptabilitas, ilmu tentang “gerak-gerik” di medan pertempuran dan penyebaran tentara perang, ilmu tentang medan peperangan (*terrain*), *the nine battleground*, strategi penyerangan dengan senjata dan ilmu tentang *intelligence* dan spionase⁵⁴.

Keempat, Wuzi Wu Qi (Wu Qi's Wuzi), secara substantif merupakan ilmu militer yang membahas mengenai “seluk-beluk” ilmu peperangan, yang mengajarkan tentang enam ajaran utama sebagai berikut yaitu: perencanaan perang negara, penilaian kritis terhadap musuh, mengorganisir tentara perang, *Tao of the General*, merespon perubahan dan *stimulating the officers*⁵⁵.

Kelima, Wei Liaozi, merupakan teori tentang strategi militer, yang secara substantif mengajarkan tentang pentingnya dua pendekatan utama dalam menjalankan peperangan yaitu: pendekatan sipil dan militer. Menurut

⁵³ *Ibid.*, p. 115-116.

⁵⁴ *The Art of War*. n.d. 20 November 2014. <en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War>.

⁵⁵ Ralph D. Sawyer, *op.cit.*, p. 202.

Wei Liaozi, pertanian dan masyarakat sipil adalah sumber daya utama bagi negara dalam mendukung peperangan, keduanya harus dikembangkan dan dipelihara, serta dipersiapkan untuk di kemudian hari dijadikan sebagai basis sumber daya perang negara⁵⁶.

Keenam, Tiga Strategi Huang Shigong (*Huang Shigong's Three Strategies*), merupakan ilmu tentang strategi militer, yang mengajarkan tentang tiga hal utama⁵⁷ yaitu:

1. Penggunaan kombinasi strategi *hard* dan *soft power* dalam mencapai tujuan-tujuan peperangan. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang pemimpin harus menjadi figur yang dermawan, dan mampu membangkitkan rasa hormat, sesuai dengan apa yang sepantasnya dilakukan.
2. Bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi aktual dengan mengesampingkan hal-hal yang terkait dengan imajinasi, memori masa lampau atau kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari situasi dan kondisi yang tidak terkait. Selain itu juga, bertindak atas dasar observasi dan persepsi, dan fleksibel, setiap saat dapat memodifikasi perencanaan strategi, dan
3. Menjunjung tinggi sistem meritokrasi, dengan mempekerjakan hanya yang memiliki kapabilitas dan kapasitas. Hal ini memerlukan analisis yang akurat untuk memperoleh hasil yang maksimal.

⁵⁶ Ralph D. Sawyer and Mei Chun Sawyer. *The Seven Military Classics of Ancient China*. Westview Press, 1993, p. 232-238.

⁵⁷ *Three Strategies of Huang Shigong - One of the Seven Military Classics of Ancient China*. n.d. 15 November 2014. <http://china.wikivoyage.org/wiki/2711item:8727.html>

Ketujuh, Questions and Replies between Tang Taizong and Li Weigong, merupakan ilmu tentang strategi militer, secara substantif, ajaran ini berbeda dengan keenam ajaran lainnya. Sumber ini menjelaskan mengenai bagaimana Tiongkok di masa Dinasti Tang sudah mencapai tingkat peradaban yang tinggi, dimana Tiongkok dilengkapi dengan kekuatan militer yang terdiri atas kekuatan infantri, bala tentara peluncur busur bersilang dan kavaleri (pasukan/barisan kuda). Penggunaan kereta tempur sudah sejak lama “dimuseumkan” sejak Tiongkok telah memiliki teknologi militer dan persenjataan yang secara eksklusif terbuat dari besi dan baja. Memiliki jumlah bala tentara yang banyak, dengan unit-unit perang yang kohesif, memungkinkan Tiongkok untuk mampu men-*deploy* tentara dalam skala besar. Unit-unit perang profesional Tiongkok didukung oleh pasukan wajib militer yang dipersenjatai dengan baik dan disiplin secara militer. Sistem persenjataan dan unit-unit sub-nya sangat terspesialisasi. Pengakuan akan nilai-nilai militer tentang kecepatan dan mobilitas dijunjungtinggi, dengan *flanking* dan lebih mengedepankan manuver-manuver *indirect* lainnya, dibandingkan dengan *direct maneuvers* seperti “pertempuran di garis depan” atau *frontal engagement*⁵⁸.

Ambivalen dengan *Confucian Pacifism*, budaya strategis *Cultural Realism* mengajarkan bahwa penggunaan kekerasan (*doctrine of use of force*) sebagai suatu hal yang bersifat *eager*, pro-aktif dan ofensif (*offensive grand strategy*). Di satu sisi meskipun demikian *Cultural Realism*

melegitimasi eksistensi budaya strategis *Confucian pacifism*, namun hanya bersifat simbolik dan *inoperative*.

Dalam bukunya *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*, Alastair Iain Johnston⁵⁹ menegaskan bahwa Tiongkok sejak lama telah mengabaikan budaya strategis *Confucian pacifism*-nya, namun secara operasional tetap berpijak pada konsepsi *Cultural realism*. Karena budaya strategis ini, Tiongkok memandang konflik sebagai suatu hal yang tak-terelakkan (*inevitable*), memandang musuh berdasarkan pada prinsip *zero-sum-game*, menghargai utilitas dan *primacy* penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan pelbagai macam konflik-konflik yang terjadi antar negara (*coercive identity*)⁶⁰.

Lebih lanjut menurut Johnston, perilaku Tiongkok yang didasarkan pada *offensive grand strategy* tersebut episentrumnya adalah warisan semasa Tiongkok Imperial, bukan disebabkan oleh faktor struktur sistem internasional yang anarkis sehingga menciptakan impuls-impuls *realpolitik* dan *self-help system* sebagaimana dikemukakan oleh *Structural Realism*, melainkan disebabkan oleh pengaruh warisan budaya strategis *Cultural*

⁵⁹ Alastair Iain Johnston adalah *Harvard University Professor of China in World Affairs*. Johnston memperoleh gelar Ph.D dalam bidang ilmu politik dari Universitas Michigan. Fokus penelitian dan pengajarannya berkaitan dengan *ideational sources of foreign policy behavior, socialization in international institutions, and the analysis of identity in the social science mostly with reference to China and East Asia*. Salah satu karya pentingnya adalah pemikirannya mengenai budaya strategis Cina serta korelasinya terhadap model kebijakan dan diplomasi keamanan Cina, sebagaimana dijelaskannya dalam bukunya *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History* (1995). Johnston juga pernah menjabat sebagai akademisi dan policy maker di Barat.

realism itu sendiri atau *Parabellum Realist* yang sudah melekat erat dibenak para *decisions-makers* Tiongkok⁶¹.

Dalam konteks operasionalnya, dalam kondisi dimana Tiongkok menjadi kekuatan *superior*, Tiongkok memilih untuk mengejar kekuatan *offensive military capability, expansionist grand strategy* dengan melakukan kampanye dan peperangan secara luas di luar tapal batas wilayahnya (intervensi, subversi dan infiltrasi), aneksasi teritori, dan pemusnahan total (*total annihilation*) terhadap musuh-musuhnya. Namun sebaliknya, ketika Tiongkok menjadi kekuatan yang relatif lemah, Tiongkok akan mengadopsi *defensive grand strategy* seperti membangun sistem pertahanan statis (*static defense*) dan pencegahan (*deterrence*), atau bahkan akan menerapkan *accommodationist grand strategy* yang memerlukan serangkaian konsesi teritorial, insentif ekonomi, dan perjanjian perdamaian (*the Peace Treaty*). Bertolak belakang dengan *Confucian pacifism*, peningkatan kekuatan relatif Tiongkok, akan menjadikannya semakin agresif (*aggressor*), *belligerent*, dan menerapkan kebijakan keamanan yang ekspansionis (*doctrine of expansionism*)⁶².

Secara fundamental, yang terpenting menurut *Cultural Realism*, bahwa *pertama*, budaya strategis Tiongkok secara operasional tidak jauh berbeda dengan tradisi *realpolitik* Barat. Faktor konformitas dengan para mitra-mitranya di Barat, Tiongkok telah sejak berabad-abad lamanya mempraktikkan perilaku *realpolitik* tersebut. Kedua, perilaku *realpolitik* ala

Tiongkok bukan merupakan produk yang dihasilkan dari anteseden struktur anarkis sistem internasional, namun lebih merupakan produk dari proses pembelajaran sosial atau sosialisasi (*socially constructed*) dalam sebuah lingkungan yang sudah *encultured* oleh norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan *Cultural Realism*⁶³.

Para pakar strategi Tiongkok telah mempelajari ajaran-ajaran konsepsi *realpolitik* melalui pembacaan terhadap karya *The Seven Military Classics* maupun tulisan-tulisan karya militer lainnya. Mengingat konsepsi *power politics* dapat dipelajari, maka sebaliknya pula, dapat juga tidak dipelajari. Oleh karenanya, pemikiran konsepsi *hard realpolitik* yang ada di kalangan para pemimpin Tiongkok, sekiranya dapat digantikan dengan sejumlah wacana-wacana yang lebih damai lagi (*a more peaceful discourse*)⁶⁴. Hal itu sekiranya dapat diwujudkan jika para *decisions-makers* Tiongkok berhenti untuk meyakini dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan *Cultural Realism*, dan menggantikannya dengan norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga zona perdamaian diantara negara-negara akan dapat terbentuk⁶⁵.

C. *Structural Realism*

Structural Realism, sebagai budaya strategis Tiongkok, merupakan *School of Thought* yang episentrum *core values*-nya berasal dari teori struktural sistem internasional Neo-realisme atau paradigma Neo-realisme.

⁶³ *Ibid.*, p. 21.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 5.

⁶⁵ *Ibid.*, p.21.

Berbeda dengan *Confucian Pacifism* dan *Cultural Realism*, sebagai budaya strategis Tiongkok, *Structural Realism* memandang bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, dimana kekuasaan terdistribusi, tidak ada satupun budaya strategis negara-negara tertentu yang dominan berpengaruh terhadap pembentukan struktur sistem internasional, dan memengaruhi perilaku negara-negara (*states behaviors*).

Menurut *Structural Realism*, struktur material sistem internasional memiliki pengaruh yang dominan terhadap pembentukan perilaku negara-negara di dunia. Namun lebih lanjut, menurut budaya strategis ini, yang notabene didominasi oleh paradigma *Realist*, tidak menolak argumentasi bahwa ketika struktur sistem internasional tidak mampu memengaruhi perilaku para aktor (*agent*), maka di saat itulah aspek budaya strategis suatu negara dan warisan sejarahnya akan memengaruhi perilaku strategisnya pula, namun *Structural Realism* tetap berkeyakinan bahwa pertimbangan kekuasaan (*power politics*) merupakan kartu truf (*trump*) untuk memahami dan menentukan variabel unit-level analisis seperti budaya, ideologi, dan tipe rezim.

Sistem internasional yang anarkis didefinisikan sebagai ketiadaan (*absence*) otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan otoritas negara itu sendiri (*state sovereignty*). Dengan mempertimbangkan kondisi demikian, maka hal tersebut merupakan faktor permisif yang memungkinkan perang dapat terjadi kapanpun meskipun tanpa menghiraukan tujuan-tujuan dari

para aktor tersebut. Mempingat dalam sistem internasional yang anarkis

perang adalah sebuah *possibility*, negara-negara yang mengejar tujuan *survival* akan senantiasa mempersenjatai diri mereka (*arms race*) dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan keamanannya dan berusaha untuk memperoleh kekuasaan relatif sebesar-besarnya sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya (*zero-sum game*).

Oleh karena itu, kekuasaan (*power politics*) merupakan faktor yang tak-terelakkan untuk mewujudkan *survival* atau keberlangsungan hidup di dalam sebuah sistem dimana tidak adanya sebuah otoritas sentral yang mampu melindungi suatu negara dari perilaku agresif para aktor lainnya. Sebuah negara yang dikategorikan *powerful* dengan potensi sumber daya yang relatif lebih dibandingkan dengan yang lainnya, tentunya akan menerapkan *offensive grand strategy* dengan melakukan perluasan agenda kepentingan eksternal (*extended foreign interests*) baik secara politik, ekonomi dan militer. Dengan demikian, ada kesamaan pandangan (*identical view*) antara *Structural Realism* dengan *Cultural Realism* mengenai perilaku negara, meskipun mereka berbeda terkait dengan episentrum perilaku *realpolitik* para aktor. *Structural Realism* di satu sisi menekankan pentingnya faktor struktur material sistem internasional atau distribusi material, sementara *Cultural Realism* menekankan pentingnya faktor budaya strategis suatu negara dalam memengaruhi perilaku *realpolitik* suatu

Oleh karenanya, budaya strategis *Structural Realism* memandang bahwa seiring dengan semakin relatif *powerful*-nya Tiongkok dibandingkan dengan yang lainnya, menjadikannya semakin *coercive (more coercive in behaviors)* dan menggeser strateginya menjadi *offensive grand strategy*. Dengan semakin *powerful*-nya Tiongkok, didukung oleh segenap potensi sumber daya yang dimilikinya, mendorong Tiongkok tampil sebagai kekuatan ekspansionis dengan mengejar kebijakan yang *revisionist*. *Offensive grand strategy* merupakan strategi kebijakan dengan mengedepankan penggunaan kekuatan militer secara ofensif atau *offensive military capability*, membangun wilayah pengaruh (*sphere of influence*), melakukan ekspansi teritorial disertai dengan perebutan potensi sumber daya yang ada di luar tapal batasnya, atau dengan tindakan-tindakan *high-coercive* lainnya yang sekiranya memungkinkan dilakukan. Tiongkok akan menjadi sebuah kekuatan hegemonik dengan segenap potensinya untuk mengejar kebijakan yang ekspansionis sejauh kemampuan dan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Selanjutnya, *Structural Realism* menganjurkan Tiongkok untuk menggunakan strategi *offensive grand strategy* dengan menggunakan kekuatan militer untuk merespon pelbagai persoalan-persoalan keamanannya, bahwasanya Tiongkok dihadapkan pada ancaman militer (*military security*), sehingga penggunaan kekuatan militer sangat dimungkinkan ketika memang ada kesempatan, atau menggunakan kekuatan militer untuk tujuan preventif guna mencegah semakin berkembangnya potensi *vulnerability* yang dapat merongrong kekuatan

Tiongkok. Pertimbangan kapabilitas relatif menjadi faktor krusial bagi Tiongkok untuk menentukan strategi penggunaan kekuatan militer. Tiongkok akan *self-restraint* untuk menggunakan instrumentasi kekuatan (*use of force*) sekiranya biaya yang dikorbankan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat.

Tiongkok sendiri menurut budaya strategis *Structural Realism*, harus memperluas agenda dan kepentingan peperangannya di luar tapal batasnya. Tujuan peperangannya adalah *total military victory*, destruksi politik para musuh-musuhnya, dan aneksasi teritorial sebagai kompensasi kekalahan peperangan. Tujuan peperangan Tiongkok akan semakin meluas kecuali terdapat hambatan sistemik atau militer yang mengharuskannya untuk *self-restraint* terhadap upaya perluasan *foreign interests*-nya⁶⁷.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami perbedaan ketiga budaya strategis Tiongkok tersebut, perhatikan tabel komparasi berikut ini yaitu:

Tabel 1 Komparasi Budaya Strategis Tiongkok

No	Budaya Strategis	Sumber	<i>Preferred Strategy</i>		
			<i>Grand Strategy</i>	<i>Use of Force</i>	<i>War Aims</i>
1.			<i>Defensive military capability</i>		<i>Limited-aims</i>
			<i>Non-expansionist</i>		<i>No territorial-conaquest</i>

3.	<i>Structural Realism</i>	Material	Violent- means Expansionist Offensive military capability Modulated by military capability (Culture of militarist)	Adversary annihilation Territorial conquest Extended- aims
2.	<i>Cultural Realism</i>	Ideational	Non- violent means Expansionist Offensive military capability Modulated by military capability (Culture of militarist)	Adversary- annihilation Territorial conquest Extended- aims
3.	<i>Confucian Pacifism</i>	Ideational	Non- violent means Power- maximizing Unmodulated by military capability (Culture of anti-militarist)	Adversary annihilation Territorial conquest Extended- aims

Eksplanasi

1. *Confucian Pacifism (Non-Coercive Identity)*

Budaya keamanan *Confucian Pacifism* yang *pacifist anti-militarist* memengaruhi pilihan strategi *non-violent means (soft power)* dalam mencapai kepentingan keamanannya.

Grand strategy: Tiongkok tidak akan menerapkan *offensive grand strategy* meskipun terjadi pergeseran perimbangan kekuatan padanya (*shifting of balance of power*).

Use of force: Tiongkok lebih memilih untuk mengedepankan strategi *non-violent means* untuk merespon pelbagai persoalan-persoalan keamanannya. Meskipun terdapat peluang untuk menggunakan instrumentasi kekuatan (*use of force*), Tiongkok tidak akan memanfaatkan hal tersebut untuk mencapai kepentingan keamanannya.

War aims: Tujuan peperangan Tiongkok untuk mencapai kepentingan terbatas (*limited-aims*), dan tidak akan menjadi kekuatan ekspansionis dengan melakukan penaklukan wilayah, dan tidak bertujuan pula untuk "membumihanguskan" musuh

2. *Cultural Realism (Coercive Identity)*

Budaya keamanan *Cultural Realism* yang *militarist* memengaruhi pilihan strategi *violent-means (hard power)* dalam mencapai kepentingan keamanannya.

Grand strategy: Tiongkok akan menerapkan *offensive grand strategy* ketika Tiongkok menjadi lebih *powerful* dibandingkan dengan yang lainnya (*revisionist policy*).

Use of force: Tiongkok akan menggunakan instrumentasi *violent-means* dalam merespon pelbagai persoalan-persoalan keamanannya. Jika seumpamanya, terdapat peluang untuk menggunakan instrumentasi kekuatan (*use of force*), Tiongkok akan memanfaatkan hal tersebut guna mewujudkan kepentingan keamanannya.

War Aims: Tujuan peperangan Tiongkok untuk mencapai kepentingan-kepentingan keamanannya yang tak-terbatas, dan akan menjadi kekuatan yang ekspansionis dengan melakukan penaklukan wilayah, dan bertujuan pula untuk “membumihanguskan” para musuh-musuhnya.

3. *Structural Realism (Coercive Identity)*

Struktur anarkis sistem internasional (*structure*) mendorong

Tiongkok (*agent*) untuk memilih strategi *offensive use of force*

Grand strategy: Tiongkok akan menerapkan *offensive grand strategy* ketika Tiongkok menjadi lebih *powerful* dibandingkan dengan yang lainnya (*revisionist policy*).

Use of force: Tiongkok akan lebih memilih mengedepankan strategi *violent means (hard power)* untuk merespon pelbagai persoalan-persoalan keamanannya. Jika terdapat peluang untuk menggunakan instrumentasi kekuatan (*use of force*), Tiongkok akan memanfaatkan hal tersebut guna mencapai tujuan-tujuan keamanannya.

War aims: Tujuan peperangan Tiongkok untuk mencapai kepentingannya yang tak-terbatas, dan akan menjadi kekuatan ekspansionis dengan melakukan penaklukan wilayah, dan